

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 15 Januari 2011

Subyek : Perubahan Iklim

Hal : 15

Antisipasi terhadap Perubahan Iklim

OLEH BUSTANUL ARIFIN

Tantangan ekonomi pangan Indonesia pada 2011 berbeda dengan tantangan 2008. Faktor pemicu krisis pangan global 2008 adalah liarnya lonjakan harga pangan, terutama biji-bijian, yang dipicu kenaikan harga minyak bumi. Selain itu karena adanya lonjakan konsumsi industri bioenergi, ekspektasi penurunan suplai pangan karena perubahan iklim, dan spekulasi keuangan yang merambah bursa berjangka komoditas.

Tahun ini semua faktor itu masih mengancam, tetapi spekulasi di bursa komoditas tidak sedahsyat 2008. Saat ini faktor yang dominan sebagai ancaman penurunan produksi pangan adalah iklim ekstrem.

Perubahan iklim adalah fakta riil, bukan mitos. Nicholas Stern (2006) memperingatkan, langkah rehabilitasi kerusakan karena dampak perubahan iklim (reaktif) jauh lebih mahal dibandingkan dengan langkah adaptasi dan mitigasi. Selain fenomena pemanasan global dan kekeringan, kini para ahli klimatologi juga disibukkan fenomena pendinginan global karena perubahan intensitas energi matahari yang menyinari bumi.

Berdasarkan laporan International Research Institute for Climate and Society (IRI) versi Januari 2011 untuk Daerah Nino 3.4 (Pasifik dan sekitarnya), peluang musim basah (La Nina) masih tinggi (88 persen) sampai Februari-Maret-April (FMA), bahkan cukup tinggi (67 persen) sampai Maret-April-Mei (MAM).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun memperkirakan, musim hujan akan berkepanjangan, bahkan sampai musim panen raya nanti.

Sulit dibayangkan betapa besar dampaknya jika informasi perubahan iklim itu tidak diterima dan dimengerti 17,8 juta rumah tangga petani tanaman pangan. Masyarakat media dan industri informasi perlu bahu-membahu dengan pemerintah menyampaikan informasi dini tentang perubahan iklim dengan bahasa yang mudah dimengerti petani dan masyarakat awam lain.

Perubahan iklim membawa dampak buruk bagi produksi pangan, terutama biji-bijian. Studi yang dilakukan Las et al (2009) menyebutkan, perubahan iklim disertai kondisi iklim ekstrem berpotensi menurunkan produksi pangan sampai 10 persen jika negara tidak melakukan apa-apa.

Studi lain yang dilakukan Handoko et al (2008) menegaskan, jika pemerintah tak melakukan apa-apa, produksi padi sawah Indonesia pada 2050 akan turun 20,3 persen, padi ladang turun 27,1 persen, jagung turun 13,6 persen, produksi kedelai turun 12,4 persen, dan produksi gula tebu turun 7,6 persen.

Dampak perubahan iklim pada pertanian berbeda-beda di setiap daerah otonom, provinsi, dan satuan administratif lain. Kompleksitas tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perumus kebijakan dan pelaksana strategi desentralisasi ekonomi.

Kementerian Pertanian mengakui keterlambatan mengantisipasi perubahan iklim pada 2010. Dengan demikian, tidak banyak yang dapat diperbuat pada musim tanam sekarang. Maksudnya, apabila pada musim panen raya Maret-April nanti produksi padi tidak mencapai target 30 juta gabah kering giling (GKG), ancaman krisis pangan 2011 mungkin akan menjadi kenyataan.

Sulit untuk mengejar target produksi beras 68 juta ton GKG sampai akhir tahun jika kinerja produksi pada musim rendeng saat ini tidak mencapai sasaran. Pemerintah memang mengembangkan varietas tanaman pangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Namun, adopsi dan penyebarluasan varietas yang adaptif iklim ekstrem di tingkat petani butuh waktu 2-3 tahun, bergantung pada kesiapan dan kesigapan aparat birokrasi di tingkat pusat dan daerah.

Segera selesaikan

Salah satu langkah antisipasi perubahan iklim yang wajib dilakukan pemerintah saat ini adalah, pertama, segera menyelesaikan prosedur administratif dan birokrasi agar program pengadaan alat pengering gabah segera dapat diterima petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani.

Program sederhana alat pengering ini seharusnya mampu mengurangi penurunan kualitas gabah petani karena terendam terlalu lama, sekaligus menyelamatkan kejatuhan harga gabah petani. Petani akan terhibur dan merasa diperhatikan, terutama setelah pemerintah tak secara baik mengomunikasikan kebijakan soal penundaan pemberlakuan (baca: pembebasan) tarif impor komoditas pangan strategis. Apalagi tahun ini pemerintah tak menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Kedua, secara serentak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekian macam inisiatif kebijakan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan. Misalnya, program Sekolah Lapang Pengelola Pertanian Terpadu, Sekolah Lapang Perubahan Iklim, Sistem Tanam Benih Langsung, dan inisiatif lain yang dilakukan independen oleh masyarakat.

Evaluasi perlu melibatkan akademisi di universitas dan lembaga akademik agar dapat dipetik pelajaran yang utuh tentang strategi adaptasi yang efektif mengurangi dampak buruk bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan mana strategi adaptasi yang hanya proyek birokrasi, yang cuma menghasilkan laporan administratif.

Ketiga, segera memperjelas posisi kebijakan Indonesia tentang pengembangan bioteknologi, termasuk memperbaiki aransemen kelembagaan dan governansi ekonomi bagi langkah antisipasi perubahan iklim ke depan. Secara ilmiah, banyak studi menunjukkan, penggunaan bioteknologi di bidang budidaya tanaman mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan lain-lain. Selain itu, tanaman juga mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

Kini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika telah dikeluarkan dan diharapkan mampu menghasilkan ketegasan arah dan promosi pengembangan bioteknologi ke depan. Petani pangan dan masyarakat menunggu kiprah kelembagaan baru ini bagi masa depan ekonomi pangan di Indonesia.

Bustanul Arifin Guru Besar Unila; Professorial Fellow di InterCAFE dan MB IPB